

RENCANA AKSI 2022

**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN
HUKUM LHK WILAYAH KALIMANTAN**



KATA PENGANTAR

Rencana Aksi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK (Balai Gakkum) Wilayah Kalimantan tahun 2022 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan dalam waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Rencana Aksi ini memuat perencanaan dan prognosis per Triwulan di Tahun 2022 lingkup Program Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK di dalam melaksanakan berbagai tugas yang diembankan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan yang berlandaskan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2022, dengan hasil sesuai rencana yang diharapkan dan secara keseluruhan dapat mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dengan pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien.

Dengan Rencana Aksi ini diharapkan adanya optimalisasi peran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan di dalam peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pada tahun-tahun selanjutnya.

Kepala Balai,

Eduward Hutapea, S.Si

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Aksi (Renaksi) Tahunan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai Gakkum) Wilayah Kalimantan Tahun 2022 adalah dokumen yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan yang diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan oleh Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan.

I.I MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Rencana Aksi Penetapan Kinerja TA 2022 adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan. Tujuan dari Rencana Aksi ini adalah menyediakan peta jalan implementasi kegiatan lingkup Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana aksi ini menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan.

I.II LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan kegiatan Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022;
- Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor **P. /PHLHK/SET.10SET.1/ /2021** tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022;

BAB II

RENCANA AKSI

Sesuai dengan perjanjian kerja Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan TA 2022, telah disampaikan bahwa kinerja Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan adalah tersedianya instrumen dan regulasi untuk mendukung kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh unit pelaksana teknis Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan. Hal ini dapat dilihat dari indikator kerja kegiatan yang merupakan bagian dari sasaran program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tabel berikut:

Rencana Aksi Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2022 adalah sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2022
Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan	Persentase pelaku usaha/ kegiatan terhadap izin lingkungan hidup dan peraturan perundang- undangan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan	65 Persen
Teramankannya hutan dari gangguan dan ancaman	Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	2.150.000 Hektar
Terselesaikannya kasus penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Jumlah Kasus yang dilakukan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan	427 Kasus P-21

Adapun kegiatan lingkup Eselon II di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2022
Terawasinya usaha dan / atau kegiatan terhadap ketaatan izin lingkungan dan peraturan perundang – undangan terkait bidang LHK	Usaha dan / atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LHK	750 badan usaha
	PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	150 Orang
Terlaksananya operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan illegal	Operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan illegal	31 Operasi
	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal	28 Operasi
	Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	400 orang
Terselesaikannya sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan	22 Perkara
Terselesaikannya kasus pidana LHK sampai dengan P21	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	110 Perkara
	Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	182 Orang
Terwujudnya reformasi tata Kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen	Nilai Sakip Ditjen Gakkum LHK	74
	Nilai maturitas SPIP Ditjen Gakkum LHK	3

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2022
Gakkum LHK	Laporan Keuangan Ditjen Gakkum LHK yang tertib dan akuntabel	1

Adapun kegiatan lingkup Eselon III di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2022
Layanan Perkantoran	1 Layanan
Layanan Dukungan Manajemen Satker UPT	1 Layanan
Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	4 Operasi
Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	6 Operasi
Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	10 Orang
Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan Usaha	139 Badan Usaha
Peningkatan Kapasitas PPLH	5 Orang
Kasus Tindak Pidana LHK P21	26 Perkara
Peningkatan Kapasitas PPNS	4 Orang

BAB III PENUTUP

Tercapainya indikator kerja kegiatan Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan didukung oleh kontribusi penuh dari para pelaksana di unit pelaksana teknis lingkup Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan. Oleh karena itu, rencana aksi ini disusun sebagai acuan bagi pelaksana di lingkungan Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan serta semua pemangku kepentingan dalam upaya penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan akibat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana aksi ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pengembangan sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan kegiatan, dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi. Dengan disusunnya rencana aksi ini dapat mendorong penyelenggaraan program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan lingkup Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai sasaran program yang sebaik-baiknya. Upaya yang dilakukan dengan dedikasi, kerja keras dan bersungguh-sungguh serta dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat diharapkan agar tujuan program maupun kementerian secara menyeluruh dapat tercapai.

BAB IV
LAMPIRAN-LAMPIRAN

TABEL 1 PROGNOSES CAPAIAN KEGIATAN PER TRIWULAN BALAI GAKKUM KLHK TA 2022;

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Target 2022	Satuan
Layanan Perkantoran	-	-	-	1	1	Layanan
Layanan Dukungan Manajemen Satker UPT	-	-	-	1	1	Layanan
Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	1	1	1	1	4	Operasi
Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	1	2	2	1	6	Operasi
Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	-	-	-	10	10	Orang
Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan Usaha	30	35	39	35	139	Lembaga
Peningkatan Kapasitas PPLH	-	-	5	-	5	Orang
Kasus Tindak Pidana LHK P21	5	6	9	6	26	Perkara
Peningkatan Kapasitas PPNS	-	4	-	-	4	Orang

TABEL 2 PROGNOISIS CAPAIAN KEGIATAN PER BULAN BALAI GAKKUM KLHK TA 2022;

Indikator Kinerja Program	Bulan Ke-*												Satuan	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Layanan Perkantoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Layanan
Layanan Dukungan Manajemen Satker UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Layanan
Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	Operasi	
Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	-	1	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	Operasi	
Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	Orang	
Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan Usaha	10	10	10	10	10	15	10	15	10	15	12	8	Lembaga	
Peningkatan Kapasitas PPLH	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	Orang	
Kasus Tindak Pidana LHK P21	1	2	3	2	3	1	2	3	4	3	2	1	Perkara	
Peningkatan Kapasitas PPNS	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	Orang	

Rencana Aksi Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2022



Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK
Wilayah Kalimantan

2022

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK
Wilayah Kalimantan
202

